

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-procurement adalah proses pelelangan secara elektronik yang diterapkan di dalam sistem pelelangan. *E-procurement* merupakan inovasi yang baik demi terciptanya efisiensi dalam banyak faktor. Perkembangan *e-procurement* dilatar belakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi kecurangan, kurangnya transparansi dan adanya persekongkolan antara pihak-pihak terkait. Pengadaan elektronik, yang dikenal sebagai *e-procurement* dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses pengadaan dengan menggunakan aplikasi berbasis web. *E-procurement* mengacu pada pembelian barang dan jasa pada organisasi (Turban,2006). Pengadaan biasanya merupakan salah satu item hamparan terbesar dalam struktur biaya perusahaan (lennon, 2002).

Kemunculan dan proliferasi sistem *e-procurement* di perusahaan telah menghasilkan banyak informasi yang berkaitan dengan penggunaan dan implementasi. Ada banyak studi empiris yang memberikan bukti anekdotal untuk mendukung gagasan bahwa *e-procurement* membuat proses pengadaan lebih efisien dan efektif dan memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Manfaat berikut dapat dilihat: peningkatan kualitas proses, pengurangan biaya pengadaan, kepuasan pengguna, peningkatan responsif, peningkatan layanan pelanggan,

inovasi produk, perluasan pasar, pengurangan waktu siklus pembelian, pengurangan waktu staf dan efektivitas manajerial.

Pengesahan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada tanggal 1 Agustus 2012 menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara bertahap akan dilaksanakan secara *e-procurement*. Melalui portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada suatu Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) proses pengadaan berjalan secara online, terbuka, akuntabel dan transparan. Proses pemilihan kontraktor adalah serangkaian kegiatan mulai dari mengidentifikasi keperluan jasa kontraktor oleh pemilik, mempersiapkan paket lelang, melakukan lelang sampai dengan penandatanganan kontrak untuk menangani implementasi fisik proyek (Soeharto, 1997).

Keputusan untuk melakukan penawaran dalam suatu tender proyek dapat didasarkan pada adanya kesempatan, sumber daya, hubungan pada proyek, prosedur dan karakteristik proyek, resiko dan keuntungan kompetitif pada suatu proyek (Lowe dan Parvar, 2004). Dengan mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan *e-procurement* pada lelang (tender) jasa konstruksi, maka dapat membantu kontraktor dalam menguasai sistem lelang jasa konstruksi secara *e-procurement*, sehingga kontraktor dapat berkonsentrasi pada tahapan pengambilan keputusan dalam melakukan penawaran. Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan melakukan penawaran pada lelang secara *e-procurement*, maka kontraktor dapat membuat

skala prioritas, melakukan efisiensi dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengikuti lelang (tender) secara *e-procurement*.

Pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *e-procurement* serta jaminan keamanan sistem tersebut (Gunasekaran et al., 2009).

Hal ini disebabkan karena proses pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* masih dikategorikan sesuatu hal yang masih baru dan butuh pengenalan yang mendalam agar para penyedia jasa konstruksi yang mengikuti dapat merasakan efisiensi dalam proses pengadaan dengan metode *e-procurement*.

Belum banyak penelitian di Indonesia yang mengemukakan apa persepsi penyedia jasa tentang faktor positif dan negatif dari *e-procurement* sekaligus hambatan dan faktor yang mempengaruhi penyedia jasa dalam mengikuti pelelangan elektronik. Beberapa penelitian yang membahas mengenai *E-procurement* yang telah digunakan di seluruh dunia namun dianalisis terutama untuk sektor barang dan jasa yaitu dibahas dalam Davila et al. (2003), Amerika Serikat, Hawking et al. (2004), Australia, Carayannis dan Popescu (2005) di Uni Eropa, Kheng C. dan Al-hawamdeh S. (2002), Singapura dan Rankin (2006) Kanada.

Berdasarkan penelitian ini Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai acuan dan informasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh perusahaan penyedia jasa,

maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan *e-procurement* terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan dilihat dari sudut pandang penyedia jasa dari sektor publik dan sektor swasta. Dari penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan penggunaan sistem *e-procurement* dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian-penelitian berikutnya mengenai *e-procurement*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka terdapat masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menjadi pertimbangan penyedia jasa untuk mengikuti tender *e-procurement* pada sektor publik dan swasta?
2. Hambatan apa yang dihadapi penyedia jasa pada proses pengadaan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di industri konstruksi baik di sektor publik maupun sektor swasta?
3. Bagaimana persepsi penyedia tentang faktor positif dan negatif dari metode *e-procurement* dalam industri konstruksi di sektor publik dan swasta?
4. Apakah ada perbedaan persepsi antara pihak-pihak dari sektor publik dan swasta?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *e-procurement* pada industri konstruksi berdasarkan dari beberapa aspek yaitu :

1. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pertimbangan penyedia jasa untuk mengikuti tender *e-procurement* pada sektor publik dan swasta
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyedia jasa pada proses pengadaan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di industri konstruksi pada sektor publik dan swasta.
3. Mengetahui persepsi penyedia jasa tentang faktor positif dan negatif dari metode *e-procurement* dalam industri konstruksi di sektor publik dan swasta.
4. Mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara pihak-pihak dari sektor publik dan sektor swasta

1.4 Batasan masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan terencana, maka dibuat suatu batasan masalah, yaitu:

1. Objek Penelitian:
 - a. Responden berasal kontraktor yang berada di kota Jakarta, Yogyakarta, dan Banten dari gred 2 sampai gred 7
 - b. Jenis Kegiatan : Pelelangan dengan metode *e-procurement*
2. Kuesioner dikumpulkan minimal 40 kuesioner dari seluruh perusahaan jasa konstruksi di Jakarta, Yogyakarta dan NTT yang melakukan kegiatan lelang.
3. Sudut pandang penelitian adalah pelaksanaan pada pengadaan jasa secara elektornik (*e-procurement*) dari sisi penyedia jasa dan pihak yang terkait pada pelaksanaan pelelangan secara elektronik. 3 aspek yang akan ditinjau adalah persepsi penyedia jasa terhadap *e-procurement*, faktor-faktor yang

mempengaruhi penyedia jasa dalam mengikuti proyek *e-procurement* dan hambatan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

